



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**RENCANA KERJA
(R E N J A)
P E R U B A H A N
T A H U N 2021**

TONDANO, 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa masuk pada tipe A yakni melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan serta penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimulan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Strategis dan Mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 serta Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Minahasa dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder, rapat forum Perangkat Daerah dan berbagai dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan

serta sinkronisasi program dan kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Utara maupun kebijakan Pemerintah Pusat termasuk didalamnya Refocusing Anggaran terkait dengan adanya Pandemic Covid-19 yang masih melanda di belahan dunia termasuk di Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tugasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Gambaran Umum Instansi

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menguraikan :

1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - Pemberdayaan usaha ekonomi desa;

- Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam;
- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, serta pengembangan partisipasi masyarakat;
- Penyelenggaraan penataan Desa;
- Fasilitasi kerjasama Desa;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

b. Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2016 terdiri dari :

- Seorang Kepala Dinas
- Seorang Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan;
 - 3) Subbagian Keuangan.
- Empat Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Seksi :
 - 1) Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna:**
 - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa;
 - b) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - c) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
 - 2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat:**
 - a) Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
 - 3) Bidang Pemerintahan Desa:**
 - a) Seksi Penataan Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - b) Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

- 4)** Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa:
- a) Seksi Pengembangan Kerjasama Desa;
 - b) Seksi Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana Desa; dan
 - c) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini adalah sebagai panduan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2021.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa adalah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa s.d. Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa
Sampai Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10	11	
	Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
02	2 01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	227 desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 %	227 desa	0 desa	0 %
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa	227 desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 %	227 desa	0 desa	0 %	
03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	25,5 %	23,7 %	23,7 %	23,7 %	100 %	23,7 %	23,7 %	100 %	
03	2 01	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang akan difasilitasi kerjasama desa	100 desa	50 desa	0 desa	0 desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	58 desa	54 desa	0 desa	0 desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %	
04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi yang baik	24,22 %	9,69 %	9,69 %	9,69 %	100 %	14,53 %	17,62 %	121,2 % 6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10	11		
04	2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	227 desa	227 desa	227 desa	227 desa	100 %	227 desa	227 desa	100 %
				Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	270 d/k	60 d/k	0 d/k	0 d/k	100 %	0 %	0 %	0 %
				Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan asset desa	227 desa	227 desa	227 desa	227 desa	100 %	227 desa	227 desa	100 %
				Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten	15 Bumdes	3 Bumdes	3 Bumdes	3 Bumdes	100 %	3 Bumdes	3 Bumdes	100 %
				Jumlah desa lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (hukum tua)	227 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 %	99 desa	0 desa	0 %
				Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	227 desa	0 desa	0 desa	0 Desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %
05			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peran lembaga masyarakat desa dalam menunjang pembangunan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
05	2	01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kegiatan TP-PKK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	20 %
				Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	150 Desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 %	50 desa	0 %	0 %
				Jumlah Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	440 Lkd	390 Lkd	270 Lkd	270 Lkd	100 %	270 Lkd	270 Lkd	100 %
				Jumlah LPM berprestasi tingkat kabupaten	12 Lpm	4 Lpm	0 Lpm	0 Lpm	0 %	0 Lpm	0 Lpm	0 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10	11		
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif	50 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %		
		Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	50 desa	0 desa	0 desa	0 desa	0 %	0 desa	0 desa	0 %		
		Jumlah jenis TTG yang dipamerkan dalam Gelar TTG Nasional	9 jenis	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0 %	0 jenis	0 jenis	0 %		
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	100 %	3 Nilai	3 Nilai	100 %	
01	2	01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbup	100 %	23,52 %	41,18 %	41,18 %	100 %	64,70 %	58,82 %	58,82 %
				Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan	100 %	20 %	40 %	40 %	100 %	60 %	50 %	50 %
				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan	100 %	20 %	40 %	40 %	100 %	60 %	60 %	60 %
01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	
01	2	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan	100 %	20 %	40 %	40 %	100 %	60 %	60 %	
01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	100 %
				Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %	97 %	97 %	100 %
01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	80 unit	17 unit	5 unit	5 unit	100 %	0 unit	0 unit	0 %

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10	11		
01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik/ laik fungsi	80 %	70 %	70 %	70 %	100 %	70 %	70 %	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Persentase Desa yang Maju dan Mandiri

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai perencanaan dalam dokumen Renstra dan Renja Tahun 2020 telah menargetkan klasifikasi perkembangan desa yang maju dan mandiri yaitu 9,69% atau 22 desa, dan dari hasil klasifikasi yang dilakukan mencapai 47,57% atau 108 desa, yang terdiri dari 77 desa dengan klasifikasi desa maju dan 31 desa dengan klasifikasi desa mandiri, hasil ini menunjukkan adanya pencapaian target melebihi 100% atau 490%. Dibandingkan dengan tahun 2019 persentase desa yang maju dan mandiri tercatat 15,41% (35 desa) ini berarti ada kenaikan sebesar 308% di tahun 2020).

Salah satu indikator yang mempengaruhi peningkatan status desa yaitu adanya dana transfer ke desa yang cukup besar, sehingga memotivasi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Tabel 2.2.1
Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa

No	Tingkat Perkembangan Desa	2018	2019	2020
1	Sangat Tertinggal	1	0	0
2	Tertinggal	76	31	0
3	Berkembang	138	161	119
4	Maju	12	35	77
5	Mandiri	0	0	31

2. Persentase BUM Desa yang berkembang

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUM Desa merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa.

BUM Desa memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2020 di Kabupaten Minahasa, pendataan perkembangan BUM Desa tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yaitu adanya wabah Pandemic Covid-19, dari target 9,6% tidak tercapai dan tetap pada posisi 4,80% atau 11 BUM Desa dari 227 BUM Desa yang ada.

Walaupun demikian penilaian lomba BUM Desa di Tahun 2020 dapat berjalan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan pencegahan Pandemic Covid-19.

Tabel 2.2.2

BUM Desa Kategori "Berkembang" di Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat
2.	Looren	Tonsewer Selatan	Tompaso Barat
3.	Sendangan	Sendangan	Tompaso
4.	Esa Waya	Paslaten	Remboken
5.	Pinulutan	Pulutan	Remboken
6.	Padior	Talikuran	Tompaso
7.	Wue'na	Kiawa Dua	Kawangkoan Utara
8.	Suka Maju	Raringis Utara	Langowan Barat
9.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur
10.	Masawangan	Lolah Dua	Tombariri Timur
11.	Gagaran	Sinuian	Remboken

3. Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten

Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten sampai tahun 2020 yaitu 2,20% (target tercapai 100%) atau 5 BUM Desa dari 227 BUM Desa.

Tabel 2.2.3

BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN	KET
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 & 2020
2.	Metuari	Raranon	Langowan Barat	2019
3.	Matuari	Sendangan	Tompaso	2019
4.	Pinulutan	Pulutan	Remboken	2020
5.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur	2020

4. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sampai dengan tahun 2020 90,42%, untuk perhitungannya dimana indikator penilaian yang terdiri dari 4 indikator yaitu kondisi kantor desa, peralatan kantor, jaringan internet serta sarana prasarana kantor lainnya dengan total skor sebagai bilangan pembanding/pembagi adalah 90.800 (masing-masing indikator bernilai 100 point), dan capaian yang ada dari keempat indikator tersebut sampai tahun

2020 berjumlah 82.100, jadi perhitungannya adalah $82.100/90.800 \times 100\% = 90,42\%$.

Tabel 2.2.4

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sampai dengan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
1.	Eris	1	Telap	---	√	√	√	√
		2	Watumea	√	---	√	√	√
		3	Eris	---	√	√	√	√
		4	Maumbi	---	---	√	√	√
		5	Tandengan	√	---	√	√	√
		6	Ranomerut	√	---	√	√	√
		7	Touliang Oki	---	√	√	√	√
		8	Tandengan Satu	√	---	√	√	√
2	Kombi	9	Tulap	√	---	√	√	√
		10	Lalumpe	√	---	√	√	√
		11	Kayubesi	---	√	√	√	√
		12	Ranowangko II	√	---	√	√	√
		13	Kombi	---	√	√	√	√
		14	Sawangan	---	---	√	√	√
		15	Kolongan	---	---	√	√	√
		16	Rerer	√	---	√	√	√
		17	Kinaleosan	---	---	√	√	√
		18	Makalisung	---	√	√	√	√
		19	Kalawiran	√	---	√	√	√
3.	Lembean Timur	20	Kolongan I	√	---	√	√	√
		21	Rerer I	---	---	√	√	√
		22	Kapataran	---	---	√	√	√
		23	Seretan	---	---	√	√	√
		24	Atep Oki	---	---	√	√	√
		25	Karor	---	---	√	√	√
		26	Kaleosan	---	---	√	√	√
		27	Watulaney	√	---	√	√	√
		28	Kayuroya	---	---	√	√	√
		29	Seretan Timu	---	√	√	√	√
		30	Parentek	---	---	√	√	√
		31	Kapataran Satu	---	√	√	√	√
4.	Kakas	32	Watulaney Amian	---	---	√	√	√
		33	Kayuatu	---	---	√	---	√
		34	Wineru	√	---	√	---	√
		35	Rinondor	---	---	√	---	√
		36	Sendangan	√	---	√	√	√
		37	Pahaleten	√	---	√	√	√
		38	Talikuran	---	√	√	√	√
		39	Tounelet	---	√	√	√	√
		40	Paslaten	√	---	√	√	√
		41	Kaweng	---	√	√	√	√
		42	Toulimembet	√	---	√	√	√
		43	Makalelon	---	---	√	---	√
		44	Tumpaang	---	---	√	---	√
		45	Mahembang	---	---	√	√	√
		5.	Tompaso	46	Tember	√	---	√
47	Kamanga			√	---	√	√	√
48	Sendangan			√	---	√	√	√
49	Talikuran			√	---	√	√	√
50	Tempok			√	---	√	√	√
51	Liba			√	---	√	√	√
52	Tolok			√	---	√	√	√
53	Kamanga II			√	---	√	√	√
54	Tempok Selatan			√	---	√	√	√
55	Tolok Satu			√	---	√	√	√
6.	Remboken	56	Kasuratan	√	---	√	√	√
		57	Parepei	√	---	√	√	√
		58	Pulutan	√	---	√	√	√
		59	Sinuian	---	√	√	√	√
		60	Kaima	---	√	√	√	√
		61	Sendangan	---	√	√	√	√
		62	Timu	---	√	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		63	Talikuran	---	√	√	√	√
		64	Tampusu	√	---	√	√	√
		65	Paslaten	---	√	√	√	√
		66	Leleko	---	√	√	√	√
7.	Langowan	67	Wolaang	√	---	√	√	√
	Timur	68	Teep	√	---	√	√	√
		69	Karondoran	√	---	√	√	√
		70	Waleure	√	---	√	√	√
		71	Amongena I	√	---	√	√	√
		72	Amongena II	√	---	√	√	√
		73	Sumarayar	√	---	√	√	√
		74	Amongena III	---	---	√	√	√
8.	Langowan	75	Koyawas	√	---	√	√	√
	Barat	76	Walewangko	√	---	√	√	√
		77	Noongan	√	---	√	√	√
		78	Raringis	√	---	√	√	√
		79	Ampreng	√	---	√	√	√
		80	Tumaratas	√	---	√	√	√
		81	Paslaten	---	√	√	√	√
		82	Lowian	√	---	√	√	√
		83	Tounelet	√	---	√	√	√
		84	Kopiwangker	√	---	√	√	√
		85	Noongan Dua	---	---	√	√	√
		86	Noongan Tiga	---	---	√	√	√
		87	Tumaratas Dua	√	---	√	√	√
		88	Raranon	√	---	√	√	√
		89	Raringis Utara	---	---	√	√	√
		90	Raringis Selatan	√	---	√	√	√
9.	Sonder	91	Leilem	√	---	√	√	√
		92	Kolongan Atas	√	---	√	√	√
		93	Tounelet	√	---	√	√	√
		94	Talikuran	√	---	√	√	√
		95	Kauneran	---	√	√	√	√
		96	Sendangan	√	---	√	√	√
		97	Rambunan	√	---	√	√	√
		98	Sawangan	---	√	√	√	√
		99	Tincep	√	---	√	√	√
		100	Timbukar	---	---	√	√	√
		101	Leilem Dua	√	---	√	√	√
		102	Leilem Tiga	√	---	√	√	√
		103	Kolongan Atas 2	---	---	√	√	√
		104	Kauneran Satu	√	---	√	√	√
		105	Rambunan Amian	---	---	√	√	√
		106	Sendangan Satu	---	---	√	√	√
		107	Talikuran Satu	---	---	√	√	√
		108	Tounelet Satu	---	---	√	√	√
		109	Kolongan Atas Satu	√	---	√	√	√
10.	Kawangkoan	110	Tondegesan	√	---	√	√	√
		111	Kanonang III	√	---	√	√	√
		112	Tondegesan I	√	---	√	√	√
		113	Tondegesan II	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	114	Pineleng I	√	---	√	√	√
		115	Pineleng II	√	---	√	√	√
		116	Sea I	√	---	√	√	√
		117	Sea II	√	---	√	√	√
		118	Winangun Atas	√	---	√	√	√
		119	Warembungan	√	---	√	√	√
		120	Sea	√	---	√	√	√
		121	Kali	√	---	√	√	√
		122	Kali Selatan	√	---	√	√	√
		123	Pineleng Dua Indah	√	---	√	√	√
		124	Lotta	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	125	Sea Mitra	√	---	√	√	√
		126	Sea Tumpengan	√	---	√	√	√
		127	Pineleng Satu Timur	√	---	√	√	√
12.	Tombulu	128	Kembes II	---	---	√	√	√
		129	Kembes I	√	---	√	√	√
		130	Tombuluan	√	---	√	√	√
		131	Koka	√	---	√	√	√
		132	Suluan	√	---	√	√	√
		133	Kamangta	---	√	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		134	Sawangan	√	---	√	√	√
		135	Rumengkor	√	---	√	√	√
		136	Tikela	---	---	√	√	√
		137	Rumengkor Satu	---	√	√	√	√
		138	Rumengkor Dua	---	---	√	√	√
13.	Tombariri	139	Kumu	√	---	√	√	√
		140	Teling	---	---	√	√	√
		141	Poopoh	√	---	√	√	√
		142	Ranowangko	√	---	√	√	√
		143	Senduk	√	---	√	√	√
		144	Pinasungkulan	√	---	√	---	√
		145	Mokupa	√	---	√	√	√
		146	Sarani Matani	√	---	√	√	√
		147	Borgo	√	---	√	√	√
		148	Tambala	√	---	√	√	√
14.	Tondano	149	Tonsea Lama	√	---	√	√	√
	Utara	150	Kembuan	√	---	√	√	√
		151	Kembuan Satu	---	---	√	√	√
15.	Langowan	152	Palamba	---	√	√	√	√
	Selatan	153	Atep	√	---	√	√	√
		154	Manembo	√	---	√	√	√
		155	Temboan	---	√	√	√	√
		156	Rumbia	√	---	√	---	√
		157	Winebetan	√	---	√	√	√
		158	Kaayuran Atas	---	√	√	√	√
		159	Kaayuran Bawah	---	√	√	√	√
		160	Kawatak	√	---	√	√	√
		161	Atep Satu	---	√	√	√	√
16.	Langowan	162	Walantakan	√	---	√	√	√
	Utara	163	Taraitak	√	---	√	√	√
		164	Karumenga	√	---	√	√	√
		165	Toraget	√	---	√	√	√
		166	Tempang	√	---	√	√	√
		167	Tempang II	√	---	√	√	√
		168	Tempang III	√	---	√	√	√
		169	Taraitak Satu	√	---	√	√	√
17.	Kakas Barat	170	Wasian	√	---	√	√	√
		171	Panasen	√	---	√	√	√
		172	Tountimomor	---	√	√	√	√
		173	Totolan	---	√	√	√	√
		174	Passo	---	√	√	√	√
		175	Kalawiran	√	---	√	√	√
		176	Touliang	√	---	√	√	√
		177	Simbel	---	---	√	√	√
		178	Wailang	√	---	√	---	√
		179	Bukittinggi	√	---	√	---	√
18.	Kawangkoan	180	Kiawa Satu	√	---	√	√	√
	Utara	181	Kiawa Satu Utara	---	---	√	√	√
		182	Kiawa Satu Barat	---	---	√	√	√
		183	Kiawa Dua	√	---	√	√	√
		184	Kiawa Dua Timur	√	---	√	√	√
		185	Kiawa Dua Barat	---	---	√	√	√
19.	Kawangkoan	186	Kayuuwi	√	---	√	√	√
	Barat	187	Kayuuwi Satu	---	√	√	√	√
		188	Kanonang Satu	√	---	√	√	√
		189	Kanonang Dua	√	---	√	√	√
		190	Kanonang Empat	√	---	√	√	√
		191	Kanonang Lima	√	---	√	√	√
		192	Tombasian Atas	---	---	√	√	√
		193	Tombasian Atas Satu	---	√	√	√	√
		194	Tombasian Bawah	√	---	√	√	√
		195	Ranolambot	√	---	√	√	√
20.	Mandolang	196	Kalasey Satu	√	---	√	√	√
		197	Kalasey Dua	√	---	√	√	√
		198	Tateli	---	√	√	√	√
		199	Tateli Weru	√	---	√	√	√
		200	Tateli Satu	---	√	√	√	√
		201	Tateli Dua	√	---	√	√	√
		202	Tateli Tiga	√	---	√	√	√
		203	Koha	√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		204	Koha Barat	---	√	√	√	√
		205	Koha Timur	---	√	√	√	√
		206	Koha Selatan	---	√	√	√	√
		207	Agotey	√	---	√	√	√
21.	Tombariri	208	Lemoh	√	---	√	√	√
	Timur	209	Lemoh Barat	√	---	√	√	√
		210	Lemoh Timur	√	---	√	√	√
		211	Lemoh Uner	√	---	√	√	√
		212	Lolah	√	---	√	√	√
		213	Lolah Satu	---	---	√	√	√
		214	Lolah Dua	√	---	√	√	√
		215	Lolah Tiga	√	---	√	√	√
		216	Ranotongkor	√	---	√	√	√
		217	Ranotongkor Timur	---	√	√	√	√
22.	Tompaso	218	Pinaesaan	√	---	√	√	√
	Barat	219	Tompaso II	---	√	√	√	√
		220	Tompaso II Utara	√	---	√	√	√
		221	Pinabetengan Utara	---	√	√	√	√
		222	Pinabetengan	√	---	√	√	√
		223	Pinabetengan Selatan	√	---	√	√	√
		224	Tonsewer	√	---	√	√	√
		225	Tonsewer Selatan	√	---	√	√	√
		226	Touure	√	---	√	√	√
		227	Touure Dua	√	---	√	√	√

5. Persentase LPM Berprestasi

Kegiatan LPM Berprestasi di tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19 dan sampai Tahun 2020 posisi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1,48%

Tabel 2.2.5

LPM Berprestasi Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

No	Nama LPM	Kecamatan	Ket
1	LPM Desa Tonsealama	Tondano Utara	2019 (Terbaik 1 Kategori Desa)
2	LPM Desa Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 (Terbaik 2 Kategori Desa)
3	LPM Desa Lemoh Barat	Tombariri Timur	2019 (Terbaik 3 Kategori Desa)
4	LPM Kelurahan Rinegetan	Tondano Barat	2019 (Terbaik 1 Kategori Kelurahan)

6. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif sampai tahun 2020 dari 270 PKK desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa semuanya 100% aktif.

7. Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang Pembangunan Desa

Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa sampai tahun 2020 adalah 100% berperan serta dalam hal perencanaan pembangunan desa.

8. Persentase Desa yang memiliki dan memanfaatkan TTG

Persentase Desa yang memiliki dan memanfaatkan TTG sampai Tahun 2020 adalah 13,21% atau 30 desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.

Tabel 2.2.6
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
1	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan	Paslaten	Kakas
2	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Karor	Lembean Timur
3	Meja Putar	Membentuk Gerabah/Keramik	Pulutan	Remboken
4	Mesin Aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik	Pulutan	Remboken
5	Irigasi Pipa Pvc	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi	Tember	Tompaso
6	Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik	Paslaten	Kakas
7	Mesin Cacah	Mencacah Sampah	Tonsea Lama	Tondano Utara
8	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Noongan	Langowan Barat
9	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Kamangta	Tombulu
10	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
11	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Timbukar	Sonder
12	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
13	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Timur	Tombariri Timur
14	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Ranotongkor Timur	Tombariri Timur
15	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh	Tombariri Timur
16	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh Uner	Tombariri Timur
17	Mesin Pengolahan Vco	Pengolahan Vco	Lemoh	Tombariri Timur
18	Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik	Lemoh	Tombariri Timur
19	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu	Kawangkoan Utara
20	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu Barat	Kawangkoan Utara
21	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Kauneran Satu	Sonder
22	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa	Talikuran Satu	Sonder
23	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Talikuran Satu	Sonder
24	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Talikuran Satu	Sonder
25	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Talikuran	Sonder
26	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Sendangan	Sonder
27	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Tincep	Sonder
28	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tincep	Sonder
29	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Tincep	Sonder
30	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tounelet	Sonder
31	Alat Penanam Padi	Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
32	Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan	Tounelet	Sonder
33	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Tounelet	Sonder
34	Mesin Penanam Jagung	Mempermudah Dlm Menanam Jagung/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
35	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Tountimomor	Kakas Barat
36	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Kalawiran	Kakas Barat
37	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Touliang	Kakas Barat
38	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Passo	Kakas Barat

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
39	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Panasen.	Kakas Barat
40	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Tountimomor	Kakas Barat
41	Alat Peras	Mempermudah Dan Efektif Memeras Santan	Panasen	Kakas Barat
42	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Satu	Tombariri Timur
43	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Tiga	Tombariri Timur
44	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung	Lolah Dua	Tombariri Timur
45	Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik(Kompor Gas & Listrik	Lemoh Timur	Tombariri Timur

9. Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih

Pemilihan Kepala Desa yang direncanakan di Tahun 2020 berjumlah 99 orang, ditunda pelaksanaannya di Tahun 2021 karena pandemic covid-19.

10. Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran Pertanggungjawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas sampai dengan Tahun 2020 semua desa mempunyai dokumen tersebut (100%)

11. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas sampai dengan Tahun 2020 juga semua desa mempunyai dokumen tersebut.

12. Persentase Desa yang melakukan Kerjasama

Persentase desa yang melakukan kerjasama sampai dengan Tahun 2020 adalah 23,78% atau 54 desa yang sudah melakukan kerjasama desa dari total desa 227 desa.

Tabel 2.2.7
Data Kerjasama Desa sampai Tahun 2020

NO	KECAMATAN		NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
1	TOMPASO BARAT	1	DESA TONSEWER	DESA TONSEWER SELATAN	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		2	DESA TONSEWER SELATAN	DESA TONSEWER	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		3	DESA PINABETENGAN	DESA PINABETENGAN UTARA, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		4	DESA PINABETENGAN UTARA	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		5	DESA PINABETENGAN SELATAN	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN UTARA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		6	DESA TOUURE	DESA TOUURE DUA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		7	DESA TOUURE DUA	DESA TOUURE	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
2	KOMBI	8	DESA KOLONGAN	DESA KOLONGAN SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		9	DESA KOLONGAN SATU	DESA KOLONGAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		10	DESA RERER	DESA RERER SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		11	DESA RERER SATU	DESA RERER	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH

NO	KECAMATAN		NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
3	KAKAS	12	DESA WINERU	DESA MAKALELON	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		13	DESA MAKALELON	DESA WINERU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		14	DESA SENDANGAN	DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		15	DESA PASLATEN	DESA SENDANGAN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		16	DESA PAHALETEN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		17	DESA TALIKURAN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		18	DESA TOUNELET	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
4	REMBOKEN	19	DESA KAIMA	DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		20	DESA SENDANGAN	DESA KAIMA, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		21	DESA TIMU	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		22	DESA TALIKURAN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		23	DESA PASLATEN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		24	DESA LELEKO	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
5	KAWANGKOAN BARAT	25	DESA TOMBASIAN ATAS	DESA TOMBASIAN ATAS SATU, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		26	DESA TOMBASIAN ATAS SATU	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		27	DESA TOMBASIAN BAWAH	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN ATAS SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		28	DESA KANONANG II	DESA KANONANG IV, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		29	DESA KANONANG IV	DESA KANONANG II, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		30	DESA KANONANG V	DESA KANONANG II, DESA KANONANG IV	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		31	DESA KAYUUWI	DESA KAYUUWI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
32	DESA KAYUUWI SATU	DESA KAYUUWI SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH		
6	LANGOWAN TIMUR	33	DESA AMONGENA I	DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		34	DESA AMONGENA II	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		35	DESA AMONGENA III	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		36	DESA WOLAANG	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
7	TOMBARIRI TIMUR	37	DESA LOLAH	DESA LOLAH I, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		38	DESA LOLAH I	DESA LOLAH, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		39	DESA LOLAH II	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		40	DESA LOLAH III	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH II	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
8	PINELENG	41	DESA PINELENG I	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		42	DESA PINELENG II	DESA PINELENG DUA INDAH, DESA PINELENG I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
				DESA PINELENG DUA INDAH, DESA LOTTA	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		43	DESA PINELENG DUA INDAH	DESA PINELENG I, DESA PINELENG II, DESA PINELENG II, DESA LOTTA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		44	DESA LOTTA	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN

NO	KECAMATAN		NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
		45	DESA SEA	DESA SEA I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		46	DESA SEA I	DESA SEA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		47	DESA SEA II	DESA SEA TUMPENGAN	PENGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
		48	DESA SEA TUMPENGAN	DESA SEA II	PENGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
		49	DESA KALI	DESA KALI SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		50	DESA KALI SELATAN	DESA KALI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
9	LANGOWAN SELATAN	51	DESA ATEP	DESA ATEP SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		52	DESA ATEP SATU	DESA ATEP	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
10	LANGOWAN UTARA	53	DESA TEMPANG	DESA TEMPANG III	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		54	DESA TEMPANG III	DESA TEMPANG	KEAMANAN DAN KETERTIBAN

13. Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik

Target Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik di Tahun 2020 adalah 19,38% dan tidak tercapai akibat adanya pandemic covid-19 dan posisi tetap pada angka 9,69% atau 22 desa dari total 227 desa.

Tabel 2.2.8

*Data Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik
(Perwakilan Desa dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten)
Sampai pada Tahun 2020*

No	Kecamatan	Desa	Tahun
1	Kawangkoan Utara	Kiawa II Timur	2019
2	Kawangkoan	Kanonang III	2019
3	Kawangkoan Barat	Kanonang I	2019
4	Langowan Selatan	Rumbia	2019
5	Langowan Timur	Teep	2019
6	Langowan Utara	Walantakan	2019
7	Mandolang	Tateli Dua	2019
8	Pineleng	Sea I	2019
9	Tombulu	Kembes Satu	2019
10	Tombariri	Ranowangko	2019
11	Tombariri Timur	Lemoh	2019
12	Sonder	Leilem	2019
13	Kakas	Wineru	2019
14	Kakas Barat	Panasen	2019
15	Remboken	Tampusu	2019
16	Tompaso Barat	Pinbabetengan Selatan	2019
17	Tompaso	Sendangan	2019
18	Langowan Barat	Kopiwangker	2019
19	Kombi	Rerer	2019
20	Lembean Timur	Watulaney	2019
21	Eris	Maumbi	2019
22	Tondano Utara	Tonsealama	2019

14. Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Wilayah dan Kewenangan Desa
Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa sampai Tahun 2020 belum dilaksanakan.
15. Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta Berpotensi untuk dikembangkan
Persentase desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan adalah 100% desa memiliki usaha ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	11	12	13
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri			15,41%	47,57%	49,78%	51,98%	54,18%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		Permendagri 18 tahun 2020	59,21%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	
3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		Permendagri 18 tahun 2020	16,66%	45,34%	43,69%	49,58%	57,98%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang			4,84% (11 desa)	4,84% (11 desa)	5,72% (13 desa)	6,60% (15 desa)	7,48% (17 desa)	100%	-	100%	100%	100%	
5	Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten			2,64%	2,64%	3,96%	5,28%	6,60%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Predikat SAKIP Dinas PMD			CC	CC	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik			(76,61–88,30) Baik	(76,61–88,30) Baik	(76,61–88,30) Baik	(76,61–88,30) Baik	(76,61–88,30) Baik	100%	>100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Wilayah dan Kewenangan Desa			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
9	Persentase Desa yang melakukan kerjasama			23,7%	23,7%	23,7%	24,6%	25,5%	100%	-	100%	100%	100%	
10	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Permendagri 18 tahun 2020	54 desa	54 desa	54 desa	56 desa	58 desa	100%	-	100%	100%	100%	
11	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Permendagri 18 tahun 2020	0	0	0	2 desa	2 desa	-	-	-	100%	100%	
12	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik			9,69%	9,69%	14,53%	19,38%	24,22%	100%	-	100%	100%	100%	
15	Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten			1,32%	2,20%	3,52%	4,84%	5,72%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran			72,20%	90,42%	90,42%	90,63%	90,85%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	11	12	13
	Pemerintahan Desa yang baik													
17	Persentase Keikutsertaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas Tingkat Kabupaten			25,61%	25,61%	25,61%	25,61%	25,61%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten			0,17%	0,17%	0,17%	0,33%	0,50%	100%	-	100%	100%	100%	
19	Persentase Peran Lembaga Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Persentase LPM Berprestasi			1,48% (4/270x100%)	1,48% (4/270x100%)	1,48% (4/270x100%)	2,96% (8/270x100%)	4,4% (12/270x100%)	100%	-	-	100%	100%	
21	Persentase PKK Aktif		IKK	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Persentase Posyandu Aktif		IKK	100% (297/290x100%)	100% (297/290x100%)	100% (297/290x100%)	100% (297/290x100%)	100% (297/290x100%)	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Jumlah lembaga masyarakat dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Permendagri 18 tahun 2020	390 lkd/k (270 PKK, 120 LKD lainnya)	270 lkd/k (PKK)	270 lkd/k (PKK)	295 lkd/k (270 PKK, 25 LKD lainnya)	295 lkd/k (270 PKK, 25 LKD lainnya)	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Jumlah peningkatan desa yang lembaga masyarakat dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Permendagri 18 tahun 2020	0	0	50	50	50	-	-	100%	100%	100%	
25	Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG			13,21%	13,21%	13,21%	13,65%	14,09%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi merupakan kunci utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret kunci utama pembangunan berkelanjutan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan maupun desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terdiri dari lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Minahasa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, siap untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera, serta Misi yang ke tiga Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dengan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri.
- 5) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes PPDT.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- 3) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat.

- 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
 - 4) Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang.
- b. Faktor Tantangan Organisasi
- 1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta
 - 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah, pemerintahan desa dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
 - 3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
 - 4) Era Globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya.
 - 5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
 - 6) Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
 - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
 - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan wirausahaan.
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan.
 - Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
4. Pengembangan Ekonomi Kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa dengan kota
 - Mengembangkan kerjasama antar desa, dan antar daerah dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.

5. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam :
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - Pengelolaan asset dan keuangan
 - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan diluar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranan pemerintahan desa
 - Mengembangkan kerjasama antar desa
 - Melaksanakan penataan desa
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
 - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang undang desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat undang undang desa, termasuk penyusunan peraturan pemerintah sistem Keuangan desa.
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap
 - Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa masih menemui beberapa kendala yakni :

1. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Masih ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa kurang berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Masih adanya aparaturnya desa yang belum dilatih/BIMTEK
4. Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal
5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan
6. Adanya Hukum Tua yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan Hukum Tua secara serentak.
7. Masih perlunya pembinaan lembaga-lembaga desa / lembaga adat
8. Masih perlunya pembinaan sistem informasi dan data profil desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa, RPJMD Kabupaten Minahasa merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 adalah tahapan Ketiga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2021, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Minahasa.

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera, serta Misi yang ke tiga Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Misi ke empat Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah konkrit. Dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa,

maka sesuai dengan Dokumen Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa melaksanakan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan desa
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat maupun perangkat daerah merupakan masukkan kabupaten dan provinsi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu dokumen perencanaan.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Dana Desa	Minahas a	Jumlah desa penerima dana transfer desa	227 desa	
2.	Kegiatan Pusat Informasi Desa Online	Prov. Sulut	Jumlah pusat informasi desa online		Kegiatan Provinsi (keterwakilan dari Minahasa)
3.	Kegiatan Forum Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prov. Sulut	Jumlah peserta mengikuti forum pemberdayaan masyarakat desa tingkat provinsi		Kegiatan Provinsi (keterwakilan dari Minahasa)
4.	Kegiatan Diseminasi dalam rangka Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Lokal	Prov. Sulut	Jumlah peserta dari Minahasa mengikuti diseminasi pelestarian adat istiadat dan budaya lokal		Kegiatan Provinsi (keterwakilan dari Minahasa)
5.	Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.	Prov. Sulut	Jumlah desa/kelompok di Minahasa penerima bantuan pengembangan UEP Masyarakat desa	22 kelompok	Usulan Minahasa
6.	Program Bina Desa	Prov. Sulut	Jumlah desa miskin di minahasa mengikuti bina desa	10 desa miskin	Usulan Minahasa
7.	Pelatihan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Prov. Sulut	Jumlah aparatur desa di minahasa	22 org	Usulan Minahasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
			mengikuti pelatihan profil desa		
8.	Pelatihan Pengelolaan Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES	Prov. Sulut	Jumlah aparatur desa di minahasa mengikuti pelatihan pengelolaan asset desa (Sipades)	227 org	Usulan Minahasa

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara maupun RPJMD Kabupaten Minahasa. Salah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's) dan Sustainable Development Goals (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah maupun desa.

Penguatan Pemerintahan Desa tercantum NAWACITA Pemerintah Pusat yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan perdesaan.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong

pembangunan desa-desa berkembang dan mandiri yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dengan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), mempertajam efisiensi program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin, menciptakan pembangunan yang inklusif.

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 mengacu pada Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Dimana Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan masyarakat

Tujuan yang akan dicapai perangkat daerah yaitu 1). Meningkatkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas. Selanjutnya Sasaran Strategis yang hendak dicapai yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan Desa Yang Berkualitas
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Membangun kesadaran dalam kepentingan kolektif desa
- 2) Identifikasi mengenai ide-ide serta potensi pembangunan desa
- 3) Optimalisasi musyawarah desa secara bersama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD
- 4) Advokasi penyusunan RPJMDesa, yang kemudian dimasukkan dalam RKPDesa
- 5) Advokasi musyawarah pembangunan desa sesuai prinsip desa mandiri
- 6) Advokasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring BUMDesa

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 serta RKPD Perubahan Tahun 2021, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribnut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- h. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Ssarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **Program Penataan Desa**

- a. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**

- a. Fasilitas Kerjasama Antar Desa
 - Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Fasilitas Pembinaan Laporan Keuangan Desa
 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun Rincian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan DPMD Kab. Minahasa Tahun 2021
(Renja – APBD – APBD Perubahan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				8.420.369.000			7.671.690.720		4.788.077.317
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		Baik	3.730.689.000	APBD	Baik	3.458.913.993	Baik	3.165.295.993
	Kegiatan :									
2.13.01.2.01	Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbup	Minahasa	100%	1.000.000	APBD	100%		100%	
		Persentase dokumen anggaran yang ditetapkan		100%			100%		100%	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan		100%			100%		100%	
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah rancangan renstra perubahan yang tersusun	Minahasa	1 dok	500.000		1 dok			
		Jumlah rancangan renja yang tersusun	Minahasa	1 dok			1 dok			
		Jumlah rancangan renja perubahan yang tersusun	Minahasa	1 dok			1 dok			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Minahasa	1 lap			1 lap			
		Jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1 dok			1 dok			
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Minahasa	1 lap			1 lap			
		Jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang tersusun		1 dok			1 dok			
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Minahasa	1 lap			1 lap			
		Jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1 dok			1 dok			
2.13.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Minahasa	1 lap	500.000		1 lap			
		Jumlah rancangan dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok			1 dok			
	Kegiatan :									
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan	Minahasa	100%	3.198.900.000	APBD	100%	3.156.593.000	100%	2.870.085.000
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan	Minahasa	25 org	3.198.400.000	APBD	25 org	3.156.593.000	25 org	2.870.085.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
		perundang-undangan yang berlaku								
		Jumlah SPP/SPM gaji dan TPP yang disusun		28 SPP/SPM			28 SPP/SPM		26 SPP/SPM	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Minahasa	1 lap	500.000	APBD	1 lap			
		Jumlah rancangan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun		1 dok			1 dok			
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah rancangan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	Minahasa	17 lap		APBD	17 lap			
	Kegiatan :									
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan	Minahasa	100%	1.000.000	APBD	100%		100%	
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah perencanaan kebutuhan BMD SKPD yang tersusun	Minahasa	1 lap	500.000	APBD	1 lap			
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	Minahasa	4 lap	500.000	APBD	4 lap			
		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah SKPD		4 lap			4 lap			
	Kegiatan :									
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	Minahasa	95%	17.600.000	APBD	95%		95%	
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		100%			100%		100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang tersedia	Minahasa	1 unit		APBD				
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	Minahasa	28 stel	17.600.000,-	APBD				
		Jumlah PSL yang disediakan		6 stel						
		Jumlah PSR yang disediakan		21 stel						
		Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang disediakan		28 stel						
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Minahasa	Lap		APBD				
	Kegiatan :									
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	Minahasa	97%	206.289.000	APBD	97%	113.958.017		106.848.017
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Minahasa	1 paket		APBD	12 bln			
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (ATK)	Minahasa	1 Paket	14.714.000	APBD	1 paket	8.998.003	1 paket	8.998.003
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan	Minahasa	100 m2	7.300.000	APBD	52 m2	2.860.000	52 m2	2.860.000
		Jumlah penggandaan		10.000 lbr	4.500.000		6176 lbr	2.139.984	6176 lbr	2.139.984
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran yang disediakan	Minahasa	500 exp		APBD				
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	Minahasa		2.500.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Minahasa	100 org	8.500.000	APBD				
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Minahasa	150 dos	4.875.000	APBD				
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	8 kali	100.000.000		5 kali	48.750.000	5 kali	48.750.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah kabupaten	Minahasa	426 kali	63.900.000,-		297 kali	44.550.000	270 kali	44.100.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah provinsi	Sulawesi Utara				37 kali	6.660.000	20 kali	3.600.000
	Kegiatan :									
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Minahasa	1 paket	39.000.000	APBD	-	-	-	-
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Minahasa			APBD				
		- Meja ½ biro								
		- Kursi kerja								
		- Kursi rapat								
		- Kursi Kerja Pejabat								
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan :	Minahasa							
		- Komputer								
		- Laptop		2 unit	30.000.000,-	APBD				
		- Printer		2 unit	9.000.000,-	APBD				
		- Thermometer Scan								
		- Peralatan Mainframe								
	Kegiatan :									
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	Minahasa	100%	157.900.000	APBD	100%	149.882.976	100%	149.882.976

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi/telepon/Internet tersedia	Minahasa	12 bln	22.700.000	APBD	100 Mbps	15.000.000	100 Mbps	15.000.000
		Jumlah layanan jasa Listrik tersedia	Minahasa	12 bln	8.000.000	APBD	618 Kwh	7.682.976	618 Kwh	7.682.976
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah jasa sopir		1 org x 12 bln	33.600.000	APBD	1 org x 12 bln	33.600.000	1 org x 12 bln	33.600.000,-
		Jumlah jasa tenaga harian lepas		2 org x 12 bln	62.400.000	APBD	2 org x 12 bln	62.400.000	2 org x 12 bln	62.400.000,-
		Jumlah jasa tenaga kebersihan		1 org x 12 bln	31.200.000	APBD	1 org x 12 bln	31.200.000	1 org x 12 bln	31.200.000,-
	Kegiatan :									
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik/ laik fungsi	Minahasa	75%	109.000.000	APBD	75%	38.480.000	75%	38.480.000
	Sub Kegiatan :									
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam pemeliharaan	Minahasa	12 bulan	50.000.000	APBD	1 unit	38.480.000	1 unit	38.480.000
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara :	Minahasa			APBD				
		- Komputer/Laptop		4 unit	6.000.000					
		- Printer		4 unit	3.000.000					
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Minahasa	4 unit						
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Minahasa	1 paket	50.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	Minahasa	100%	50.000.000	APBD				
	Kegiatan :									
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa	Minahasa	227 desa	50.000.000	APBD				
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	Minahasa	227 desa						
	Sub Kegiatan :									
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa	Minahasa	227 desa	25.000.000,-	APBD				
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	Minahasa	227 desa	25.000.000,-	APBD				
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Minahasa	24,6%	25.000.000,-	APBD			24,6%	
	Kegiatan :									
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang akan difasilitasi kerja sama desa	Minahasa	25 desa	25.000.000,-	APBD				
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Minahasa	56 desa					56 desa	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Minahasa	0 desa						
	Sub Kegiatan :									
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama desa	Minahasa	25 desa	25.000.000,-	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	Minahasa	14,53%	2.820.000.000	APBD	14,53%	2.712.779.416	14,53%	122.784.180
		Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas		100%			100%		100%	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas		100%			100%		100%	
		Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten		3,52%			3,52%		3,52%	
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		90,42%			90,42%		90,42%	
		Persentase Keikutsertaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten		25,61%			25,61%		25,61%	
		Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten		0,17%			0,17%		0,17%	
	Kegiatan :									
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Minahasa	227 desa	2.820.000.000	APBD	227 desa	2.712.779.416	227 desa	122.784.180

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan		270 d/k			270 d/k		270 d/k	
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa		227 desa			227 desa		227 desa	
		Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten		3 Bumdesa			3 Bumdesa		3 Bumdesa	
		Jumlah Kepala Desa/ Hukum Tua terpilih dalam pemilihan kepala desa/ hokum tua		99 org			99 org			
		Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa		227 desa			227 desa		227 desa	
	Sub Kegiatan :									
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Minahasa	50 desa	25.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hokum desa	Minahasa	50 desa	25.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Minahasa	50 d/k	25.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	Minahasa	227 desa	62.000.000	APBD	270 d/k	29.999.722	270 d/k	29.999.722
		Jumlah desa lokasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset desa	Minahasa	227 desa		APBD	227 desa			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	Minahasa	22 org	45.000.000	APBD				
		Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti peningkatan kapasitas dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Minahasa	40 org						
		Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa	Minahasa	40 org						
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Minahasa	227 desa	45.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi dan pengawasan peraturan desa	Minahasa	227 desa						
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa mengikuti lomba BUM Desa tingkat kabupaten	Minahasa	22 bumdesa	50.000.000	APBD	22 bumdesa	22.799.783	22 bumdesa	22.799.783
		Jumlah BUM Desa mengikuti pembinaan dan pemberdayaan manajemen BUM Desa	Minahasa	25 bumdesa						
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (hukum tua)	Minahasa	99 desa	2.350.000.000	APBD	99 desa	2.349.995.236	-	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penyusunan profil desa/kelurahan	Minahasa	90 desa	35.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan asset desa	Minahasa	227 desa	25.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD mengikuti peningkatan kapasitas	Minahasa	50 org	25.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang difasilitasi dalam pembinaan laporan kepala desa	Minahasa	99 org	30.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan mengikuti kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten	Minahasa	25 d/k	78.000.000	APBD	25 d/k	309.984.675	25 d/k	69.984.675
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peran lembaga masyarakat desa dalam menunjang pembangunan desa	Minahasa	100%	1.794.680.000	APBD	100%	1.499.997.311	100%	1.499.997.144
		Persentase PKK aktif		100%			100%		100%	
		Persentase LPM Berprestasi		2,96%						
		Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan		100%						
		Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG		13,65%						
	Kegiatan :									
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan TP-PKK	Minahasa	15 Keg	1.794.680.000	APBD	15 Keg	1.499.997.311	15 keg	1.499.997.144

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		270			270		270	
		Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		50			50		50	
		Jumlah LPM berprestasi tingkat kabupaten		4 LPM						
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif		25 desa						
		Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna		25 desa						
		Jumlah jenis TTG yang dipamerkan dalam Gelar TTG Nasional		3 jenis						
	Sub Kegiatan :									
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	Minahasa	25 LKD	42.500.000	APBD	25 LKD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	Masyarakat Hukum Adat									
		Jumlah LPM mengikuti lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten	Minahasa	25 LPM	30.000.000,-	APBD				
		Jumlah desa lokasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Minahasa	227 desa						
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif	Minahasa	25 desa	97.000.000	APBD				
		Jumlah desa lokasi pendataan, monitoring dan evaluasi usaha-usaha ekonomi masyarakat desa	Minahasa	227 desa						
		Jumlah hasil usaha ekonomi desa yang dipamerkan di tingkat nasional	Luar Daerah	10 jenis						
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Minahasa	25 pemdes	80.000.000	APBD				
		Jumlah jenis TTG yang dipamerkan dalam gelar TTG nasional	Luar Daerah	3 jenis						
		Jumlah desa lokasi pendataan, monitoring dan evaluasi pendayagunaan TTG dan SDA	Minahasa	227 desa						
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah masyarakat menghadiri kegiatan BBGRM	Minahasa	227 org	45.180.000	APBD				
		Jumlah desa mengikuti lomba desa partisipatif tingkat kabupaten	Minahasa	22 desa						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				APBD 2021		APBD PERUBAHAN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK	Minahasa/ Luar Daerah	15 keg	1.500.000.000,-	APBD	15 keg	1.499.997.311	15 keg	1.499.997.311

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja perubahan pada Tahun 2021 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					4.788.077.317
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		APBD	Baik	3.165.295.993
	Kegiatan :					
2.13.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbup	Minahasa	APBD	100%	
		Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan			100%	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan			100%	
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah rancangan renstra perubahan yang tersusun	Minahasa			
		Jumlah rancangan renja yang tersusun	Minahasa			
		Jumlah rancangan renja perubahan yang tersusun	Minahasa			
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Minahasa			
		Jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang tersusun				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Minahasa			
		Jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang tersusun				
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Minahasa			
		Jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun				
2.13.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Minahasa			
		Jumlah rancangan dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
	Kegiatan :					
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan	Minahasa	APBD	100%	2.870.085.000
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minahasa	APBD	25 org	2.870.085.000
		Jumlah SPP/SPM gaji dan TPP yang disusun			26 SPP/SPM	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Minahasa	APBD		
		Jumlah rancangan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun				
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah rancangan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	Minahasa	APBD		
	Kegiatan :					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan	Minahasa	APBD	100%	
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah perencanaan kebutuhan BMD SKPD yang tersusun	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	Minahasa	APBD		
		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah SKPD				
	Kegiatan :					
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	Minahasa	APBD	95%	
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian			100%	
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang tersedia	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	Minahasa	APBD		
		Jumlah PSL yang disediakan				
		Jumlah PSR yang disediakan				
		Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang disediakan				
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Minahasa	APBD		
	Kegiatan :					
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	Minahasa	APBD		106.848.017
	Sub Kegiatan :					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (ATK)	Minahasa	APBD	1 paket	8.998.003
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan	Minahasa	APBD	52 m2	2.860.000
		Jumlah penggandaan			6176 lbr	2.139.984
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran yang disediakan	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Minahasa	APBD		
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Minahasa	APBD		
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah		5 kali	48.750.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah kabupaten	Minahasa		270 kali	44.100.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah provinsi	Sulawesi Utara		20 kali	3.600.000
	Kegiatan :					
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Minahasa	APBD	-	-
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Minahasa	APBD		
		- Meja ½ biro				
		- Kursi kerja				
		- Kursi rapat				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		- Kursi Kerja Pejabat				
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan :	Minahasa			
		- Komputer				
		- Laptop		APBD		
		- Printer		APBD		
		- Thermometer Scan				
		- Peralatan Mainframe				
	Kegiatan :					
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	Minahasa	APBD	100%	149.882.976
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi/telepon/Internet tersedia	Minahasa	APBD	100 Mbps	15.000.000
		Jumlah layanan jasa Listrik tersedia	Minahasa	APBD	618 Kwh	7.682.976
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah jasa sopir		APBD	1 org x 12 bln	33.600.000,-
		Jumlah jasa tenaga harian lepas		APBD	2 org x 12 bln	62.400.000,-
		Jumlah jasa tenaga kebersihan		APBD	1 org x 12 bln	31.200.000,-
	Kegiatan :					
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik/ laik fungsi	Minahasa	APBD	75%	38.480.000
	Sub Kegiatan :					
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam pemeliharaan	Minahasa	APBD	1 unit	38.480.000
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	Minahasa	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Lainnya	dipelihara :				
		- Komputer/Laptop				
		- Printer				
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Minahasa			
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Minahasa	APBD		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	Minahasa	APBD		
	Kegiatan :					
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa	Minahasa	APBD		
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	Minahasa			
	Sub Kegiatan :					
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa	Minahasa	APBD		
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa	Minahasa	APBD		
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	Minahasa	APBD	24,6%	
	Kegiatan :					
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang akan difasilitasi kerja sama desa	Minahasa	APBD		
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Minahasa		56 desa	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Minahasa			
	Sub Kegiatan :					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama desa	Minahasa	APBD		
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	Minahasa	APBD	14,53%	122.784.180
		Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas			100%	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas			100%	
		Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten			3,52%	
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik			90,42%	
		Persentase Keikutsertaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten			25,61%	
		Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten			0,17%	
		Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua			80 org	
	Kegiatan :					
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Minahasa	APBD	227 desa	122.784.180
		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan			270 d/k	
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa			227 desa	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten			3 Bumdesa	
		Jumlah Kepala Desa/ Hukum Tua terpilih dalam pemilihan kepala desa/ hokum tua				
		Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa			227 desa	
	Sub Kegiatan :					
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hokum desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	Minahasa	APBD	270 d/k	29.999.722
		Jumlah desa lokasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	Minahasa	APBD		
		Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti peningkatan kapasitas dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Minahasa			
		Jumlah aparatur pemerintah desa mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa	Minahasa			
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi dan pengawasan peraturan desa	Minahasa			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa mengikuti lomba BUM Desa tingkat kabupaten	Minahasa	APBD	22 bumdesa	22.799.783
		Jumlah BUM Desa mengikuti pembinaan dan pemberdayaan manajemen BUM Desa	Minahasa			
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (hukum tua)	Minahasa	APBD	-	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penyusunan profil desa/kelurahan	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan asset desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD mengikuti peningkatan kapasitas	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang difasilitasi dalam pembinaan laporan kepala desa	Minahasa	APBD		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan mengikuti kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten	Minahasa	APBD	25 d/k	69.984.675
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	Minahasa	APBD	100%	1.499.997.144
		Persentase PKK aktif			100%	
		Persentase LPM Berprestasi				
		Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan				
		Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG				
	Kegiatan :					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan TP-PKK	Minahasa	APBD	15 keg	1.499.997.144
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			270	
		Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			50	
		Jumlah LPM berprestasi tingkat kabupaten				
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif				
		Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna				
		Jumlah jenis TTG yang dipamerkan dalam Gelar TTG Nasional				
	Sub Kegiatan :					
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	Minahasa	APBD		
		Jumlah LPM mengikuti lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten	Minahasa	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	APBD PERUBAHAN 2021	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah desa lokasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Minahasa			
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif	Minahasa	APBD		
		Jumlah desa lokasi pendataan, monitoring dan evaluasi usaha-usaha ekonomi masyarakat desa	Minahasa			
		Jumlah hasil usaha ekonomi desa yang dipamerkan di tingkat nasional	Luar Daerah			
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Minahasa	APBD		
		Jumlah jenis TTG yang dipamerkan dalam gelar TTG nasional	Luar Daerah			
		Jumlah desa lokasi pendataan, monitoring dan evaluasi pendayagunaan TTG dan SDA	Minahasa			
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah masyarakat menghadiri kegiatan BBGRM	Minahasa	APBD		
		Jumlah desa mengikuti lomba desa partisipatif tingkat kabupaten	Minahasa			
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK	Minahasa/ Luar Daerah	APBD	15 keg	1.499.997.311

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028, RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, RKPD Perubahan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dan Ranwal Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Renja Perubahan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Perubahan Tahun 2021.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan program Pencegahan penyebaran pandemic Covid-19.
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Sasaran strategis yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, in house training, dll).
2. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu pada:
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Minahasa, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Minahasa.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas PMD Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dibuat untuk menjalankan kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa demi tercapainya *Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu* Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera.

Tondano, 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA,

JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199503 1 005

